KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA

Nama: NAUFAL ALIF RIZANDA

Email: naufalalif2002@gmail.com

No bp: 2010003600205

Universitas Ekasakti

A. PENDAHULUAN

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata *Anthropos* berarti manusia dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi) dengan gejala lainnya (non sosial). Berbeda dengan pendapat Ronckey dan Warren yang mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompoknya hubungan manusia dengan sekitarnya.

Sebagai disiplin ilmu, antropologi merupakan kajian yang multidisipliner yang berupaya mengkaji aspek manusia secara menyeluruh (holistik). Secara historis, antropologi berkembang dari suatu deskripsi hasil-hasil laporan perjalanan para penjelajah dan penjajah tentang kehidupan manusia di daerah yang disinggahi para penjelajah, atau kehidupan salah satu suku bangsa yang tinggal di daerah jajahan. Deskripsi tersebut dikenal dengan nama etnografi.

B. PEMBAHASAN

Di dalam perkembangan antropologi, masalah hukum sebenarnya juga sudah pernah ditelaah, walaupun di dalam suatu kerangka kebudayaan yang serba luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Barton, Radcliffe-Brown, Malinowski dan lainnya, pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosial-budaya.

Menurut Ihromi (1986; 3) relevansi 3 menelaah hukum dari segi antropologi, antara lain adalah: (a). Berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang (tentunya termasuk Indonesia) yang secara budaya bersifat pluralistis dalam cita-citanya mewujudkan unifikasi hukum atau modernisasi hukum; (b). berkenaan dengan kemungkinan munculnya masalah bila warga masyarakat dari lingkungan sukubangsa tertentu masih mempunyai norma-norma tradisional yang kuat dan menuntut ketaatan mengenai hal-hal tertentu, sedangkan dalam norma hukum yang sudah tertulis dan berlaku secara nasional, hal-hal yang harus ditaati itu justru dirumuskan sebagai hal yang terlarang.

Dibawah ini dapat kita pahami keterkaitan antara Antropologi dengan beberapa bidang ilmu lainnya, seperti dengan ilmu administrasi, Ilmu Politik, Ilmu Sejarah, dan sebagainya.

1. Hubungan Antropologi dan Sosiologi

Sejak lahirnya sosiologi oleh Auguste Comte, ilmu tersebut bercirikan positivistic yang objek kajiannya adalah masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok-kelompoknya. Kelompok tersebut menyangkut keluarga, etnis, suku, bangsa, komunitas pemerintahan, sebagai organisasi sosial, agama, politik, budaya, bisnis, dan organisasi lainnya. Sosiologo pun mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusuri asal-usul pertumbuhannya, serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap para anggotanya. Dengan demikian objek kajian sosiologi adalah masyarakat manusia terutama dari sudut hubungan antarmanusia dan proses-proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.

Demikian juga antropologi, yang berarti ilmu tentang manusia. Dalam antropologi budaya mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial budayanya. Hubungan antara Antropologi dan sosiologi pada satu sisi, memperlihatkan bahwa sebagian para ahli tidak lagi membedakan kedua ilmu tersebut secara ketat. Artinya beberapa fokus kajiannya dianggap sama bahkan beberapa

paradigma yang digunakan untuk melihat suatu fenomena sosial pun dianggap tidak memiliki perbedaan. Kedua ilmu itu bisa saling menukar atau saling melengkapi baik menyangkut paradigma ataupun metode yang digunakan dalam mengungkap suatu fenomena sosial.

Perbedaan antropologi dan sosiologi hanya terjadi pada sejarah berdirinya masing-masing ilmu tersebut. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kedua ilmu itu dapat saling melengkapi bahkan melebur diri menjadi satu ilmu. Pada universitas tertentu, antropologi dan sosiologi merupakan program studi yang dikembangkan secara bersama-sama di bawah departemen antropologi-sosiologi atau sosiologi-antropologi. Benarkah antropologi dan sosiologi sudah tidak dapat dibedakan lagi? .

Ada pihak lain yang masih tetap mempertahankan adanya perbedaan antara antropologi dan sosiologi. Secara historis, kemunculan kedua ilmu tersebut adalah berbeda baik dari segi paradigma yang digunakan, metode yang digunakan atau pun sasaran masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya. Di mana antropologi menekankan kajiannya pada masyarakat tradisional di luar masyarakat Barat, sedangkan sosiologi lebih menekankan pada masyarakat perkotaan yang pada saat itu ada pada masyarakat Barat sendiri.

Dalam perkembangannya, menurut pihak ini, masih dapat dilihat adanya perbedaan di antara kedua ilmu tersebut. Walaupun menurut penulis, perbedaan ini lebih didasari oleh selera dalam menggunakan paradigma dan metode yang digunakan. Sedangkan sasaran penelitiannya, sering kali tidak dapat lagi dibedakan karena keduanya sama-sama memperhatikan fenomena sosial di pedesaan (masyarakat tradisional) ataupun di perkotaan (masyarakat industri).

2. Hubungan Antropologi dan Ilmu Politik

Perkembangan ilmu terus berlanjut, begitu pula dengan ilmu politik, yang mulai banyak menaruh perhatian terhadap berbagai fenomena budaya masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung. Keanggotaan partai politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat di Indonesia yang cenderung patrimonial sangat berpengaruh pada sistem budaya politiknya. Untuk lebih dapat memahami perilaku politik masyarakat di Indonesia, Anda perlu belajar tentang kebudayaan masyarakat di Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan masing-masing suku bangsa tersebut memiliki kebudayaannya yang khas. Untuk keperluan tersebut, antropologi mempunyai peran

dalam kaitannya dengan kajian ilmu politik, karena mampu mengungkap kebudayaan suatu masyarakat yang akan menjadi tempat bagi perilaku politik.

3. Hubungan Antropologi dan Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi yang berkembang sekarang ini merupakan kajian dari ekonomi modern yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran Barat (Eropa), yang dalam beberapa bidang lebih maju dibandingkan negara-negara lain di luar negara-negara Eropa. Akan terjadi banyak permasalahan apabila pemikiran-pemikiran ekonomi modern tersebut diterapkan pada masyarakat atau negara yang sedang berkembang atau bahkan di negara-negara dunia ketiga. Pemikiran-pemikiran ekonomi modern tersebut belum tentu dapat diterapkan di negara-negara tersebut yang berada di luar negara-negara Eropa.

Pada kondisi tersebut di atas, antropologi sangat diharapkan perannya untuk dapat menjembatani pemikiran ekonomi modern dan pemikiran ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi masyarakat di negara-negara berkembang tidak akan berjalan dengan baik bilamana tanpa diikuti oleh pertimbangan aspek budaya lokal terutama yang terkait dengan pola pikir kehidupan ekonominya. Terdapat perbedaan pandangan, anggapan, pengetahuan, persepsi pada masyarakat industri dengan masyarakat nonindustri seperti pertanian. Oleh karena itu perlu kehati-hatian para perencana pembangunan yang mencoba mengadopsi pemikiran atau teknologi yang datang dari masyarakat industri (negara-negara Barat) bagi kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nonindustri.

4. Hubungan Antropologi dan Ilmu Administrasi

Pentingnya antropologi bagi Ilmu Administrasi adalah terkait dengan kebutuhan Ilmu Administrasi untuk memecahkan persoalan-persoalan administrasi pemerintahan. Kondisi sistem administrasi pemerintahan yang dianggap masih kurang baik oleh sebagian pihak, seperti masalah pemilikan tanah, membutuhkan pemecahan bukan saja dari pihak pegawai atau para adonistartur tetapi juga karena aspek yang bersumber pada latar belakang sosial budaya masyarakat yang belum menganggap penting masalah administrasi.

5. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Sejarah

Antropolohi memberi bahan prehistory sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dari tiap bangsa di dunia. Selain itu banyak persoalan dalam historiografi dari sejarah suatu bangsa dapat dipecahkan dengan metode-metode antropologi. Konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, akan memberi pengertian banyak kepada seorang ahli sejarah

untuk mengisi latar belakang dari peristiwa politik dalam sejarah yang menjadi objek penyelidikannya. Demikian juga sebaliknya, bagi para ahli antropologi jelas memerlukan sejarah, terutama sekali sejarah dari suku-suku bangsa dalam daerah yang didatanginya. Selain itu, untuk mengetahui tentang sejarah tersebut masih harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Dengan demikian, seorang sarjana antropologi sering kali harus memiliki pengetahuan tentang metode-metode sejarah untuk merekonstruksi suatu sejarah dari suatu rangkaian peristiwa sejarah.

Antropologi memberikan bahan prehistori sebagai dasar dan pangkal penulisan sejarah dari tiap-tiap bangsa di dunia. Banyak persoalan dari historiografi dari sejarah suatu bangsa yang dapat dipecahkan dengan menggunakan metode-metode antropologi. Banyak sumber sejarah yang berupa dokumen, prasasti, arsip kuno, dan lain-lain seringkali hanya berperan sebatas memberikan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa tertentu saja, sedangkan latar belakang sosial dari peristiwa-peristiwa tersebut sulit diketahui hanya dari sumber-sumber sejarah tersebut. Konsep tentang kehidupan masyarakat yang dikembangkan oleh ilmu antropologi, akan memberikan banyak pengertian kepada ahli sejarah untuk mengisi atau mengetahui latar belakang dari peristiwa-peristiwa tertentu dari sumber-sumber sejarah tersebut yang menjadi obyek penelitiannya. Demikian juga sebaliknya, para ahli antropologi juga memerlukan sejarah, khususnya sejarah dari suku bangsa-suku bangsa yang sedang ditelitinya. Sejarah diperlukan dalam antropologi, yaitu :

- a) Untuk digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi karena masyarakat yang ditelitinya telah tercemar atau terpengaruh dengan suatu kebudayaan dari luar.
- b) Untuk mengetahui tentang sejarah dari suatu proses perpaduan kebudayaan, karena seringkali terjadi sejarah suatu suku bangsa harus direkonstruksi sendiri oleh seorang peneliti. Seorang ahli antropologi seringkali harus memiliki pengetahuan tentang metode-metode sejarah untuk merekonstruksi suatu sejarah dari suatu rangkaian peristiwa sejarah. Hubungan antropologi dengan sejarah ini menyerupai hubungan antara antropologi dengan arkeologi.

6. Hubungan Antropologi dan Arkeologi serta Ilmu Sejarah

Pada dasarnya arkeologi bertujuan menyingkap sejarah kebudayaan manusia dari mulai kebudayaan kuno pada jaman purba seperti kebudayaan Mesopotamia dan kebudayaan Mesir Kuno. Di Indonesia, Arkeologi memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan di Indonesia pada masa Hindu yang hidup sekitar abad ke 4 hingga abad

ke 16. Hasil penelitian arkeologi terhadap bahan bekas reruntuhan atau alat-alat peninggalan kerajaan Hindu di Dilihat dari batasan kajiannya, antropologi terlihat lebih luas karena tidak hanya memfokuskan pada benda-benda peninggalan (artifak) saja, melainkan juga pada sistem ide (gagasan dan sistem tingkah laku). Kesulitan di dalam merekonstruksi kembali kehidupan dan persebaran kebudayaan, antropologi dan ilmu sejarah saling bertukar metode dan teori untuk lebih dapat memahami masyarakat pada umumnya. Begitu pula penggambaran tentang hasil penelitian keduanya bisa saling melengkapi sesuai bagi tujuan tertentu.

C. PENUTUP

Sosiologi hukum dan antropologi hukum memiliki objek yang jelas yaitu manusia. Antropologi hukum mengkaji suatu budaya yang terjadi pada kelompok masyarakat dan sosiologi hukum lebih menitik beratkan pada manusia dan berbagai proses hubungan sosialnya. Adanya antropologi hukum dan sosiologi hukum membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur. Berbagai bentuk penyimpangan sosial memang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat, namun ada banyak langkah pencegahan yang bisa dilakukan dan salah satunya dengan mempelajari ilmu sosiologi hukum serta ilmu antropologi hukum.

Telah akan hasil kreasi, distribusi dan transmisi Pengkajian Antropologi Hukum telah memberikan hukum yang ada. Kajian mengenai bagaimana kekuasaan hukum berproses dan memberi dampak dalam masing-masing masyarakat. Selanjutnya akan menampilkan bagaimana *feed back* dan pengaruh masyarakat-masyarakat terhadap kekuasaan hukum tersebut. Kemajemukan hukum yang ada di Indonesia dewasa ini merupakan soal tersendiri mengingat otetisitas Antropologi Hukum yang sejak lama menempatkan dan menghargai *the other laws* secara proporsional dan kontekstual. Dengan demikian para pengkaji antropologi hukum ditantang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia. masyarakat.

Dalam ilmu antropologi hukum dipelajari juga mengenai Peran, Status atau kedudukan, Nilai, Norma dan juga Budaya atau kebudayaan. Ke semuanya ini merupakan hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan ilmu antropologi hukum. Tujuan

dari ilmu antropologi untuk memperluas arena perbandingan di samping untuk merekam budaya sebelum budaya itu lenyap dan mencari suatu bangsa atau kelompok yang belum pernah diteliti. Kedua bidang besar dari antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai organisme biologis yang tekanannya pada upaya melacak evolusi perkembangan manusia dan mempelajari variasi-variasi biologis dalam spesies manusia. Sedangkan antropologi budaya berusaha mempelajari manusia berdasarkan kebudayaannya. Antropologi memiliki kedudukan, tujuan, dan manfaat, yang untuk karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat, dan bukan hanya masyarakat Eropa dan Amerika Utara saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Gokma Toni Parlindungan S, *Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Di Pengadilan Negeri Pasaman Sebagai Ceriminan Ius Constitutum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Gokma Toni Parlindungan S, *Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,
- Harniwati, *Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Jasmir, *Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Jumrawarsi Jumrawarsi, Neviyarni Suhaili, *Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif*, Ensiklopedia Education Review, Vol 2, No 3 (2020): Volume 2 No.3 Desember 2020

Mia Siratni, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Ensiklopedia Of Journal, Vol 1 No 2 Edisi 2 Januari 2019,

Remincel, *Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu Dan Angkutan Jalan Lintas Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 2, 2019.

R Amin, B Nurdin, *Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Indonesia 2015-2019*, Soumatera Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2020.